

PENDEKATAN SISTEM DALAM ADMINISTRASI PUBLIK: KERANGKA PEMIKIRAN BERBASIS *INPUT-PROCESS-OUTPUT-FEEDBACK-ENVIRONMENT*

SYSTEMS APPROACH IN PUBLIC ADMINISTRATION: A THINKING FRAMEWORK BASED ON *INPUT-PROCESS-OUTPUT-FEEDBACK-ENVIRONMENT*

Engkus^{1*}

¹Administrasi Publik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung-Indonesia

*Korespondensi: Engkus. Email: engkus@uinsgd.ac.id

(Diterima: 08-02-2026; Ditelaah: 11-03-2026; Disetujui: 07-04-2026)

ABSTRACT

Public administration faces complex and increasingly dynamic public policy and service issues. However, in many public administration studies, the framework used is still partial, thus failing to systematically explain the relationship between public demands, decision-making processes, policy outcomes, and environmental influences. This study aims to formulate and analyze a public administration framework based on a systems approach through the components of input, process, output, feedback, and environment (IPOFE). This study employed a qualitative approach with a conceptual design through a literature review method of various primary sources in the field of public administration and public policy, including both classic books and reputable scientific journal articles. The analysis was conducted through stages of literature selection, thematic analysis, and conceptual synthesis. The results show that the systems approach is able to explain public administration as an open system involving interactions between public demands as input, administrative and political processes in decision-making, policy outputs as output, feedback mechanisms as policy evaluation, and the influence of the social, political, and economic environment. The integration of these five components strengthens the analysis of public policy and services in a more comprehensive, contextual, and adaptive manner. The novelty of this research lies in the development of the IPOFE conceptual framework as a systemic analysis model that can be used in public administration studies to understand the dynamic relationship between policy processes, public services, and the government environment.

Keywords: Public Administration; Public Policy; Framework; Public Services; Systems Approach.

ABSTRAK

Administrasi publik menghadapi kompleksitas permasalahan kebijakan dan pelayanan publik yang semakin dinamis. Namun, dalam banyak penelitian administrasi publik, kerangka pemikiran yang digunakan masih bersifat parsial sehingga belum mampu menjelaskan keterkaitan antara tuntutan masyarakat, proses pengambilan keputusan, hasil kebijakan, serta pengaruh lingkungan secara sistemik. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan dan menganalisis kerangka pemikiran administrasi publik berbasis pendekatan sistem melalui komponen input, process, output, feedback, dan environment (IPOFE). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain konseptual melalui metode kajian literatur terhadap berbagai sumber utama dalam bidang administrasi publik dan kebijakan publik, baik buku klasik maupun artikel jurnal ilmiah bereputasi. Analisis dilakukan melalui tahapan seleksi literatur, analisis tematik, serta sintesis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan sistem mampu menjelaskan administrasi publik sebagai sistem terbuka yang melibatkan interaksi antara tuntutan masyarakat sebagai input, proses administrasi dan politik dalam pengambilan keputusan, keluaran kebijakan sebagai output, mekanisme umpan balik sebagai evaluasi kebijakan, serta pengaruh lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Integrasi kelima komponen tersebut memperkuat analisis kebijakan dan pelayanan publik secara lebih komprehensif, kontekstual, dan adaptif. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka konseptual IPOFE sebagai model analisis sistemik yang dapat digunakan dalam studi administrasi publik untuk memahami hubungan dinamis antara proses kebijakan, pelayanan publik, dan lingkungan pemerintahan.

Kata kunci: Administrasi Publik; Kebijakan Publik; Kerangka Pemikiran; Pelayanan Publik; Pendekatan Sistem.

Engkus. (2026). Systems Approach In Public Administration: A Thinking Framework Based On Input–Process–Output–Feedback–Environment. *Jurnal Governansi*, 12(1): 99-112.

PENDAHULUAN

Administrasi Publik berkembang sebagai disiplin ilmu yang tidak hanya bersifat normatif dan teoritis, tetapi juga berkaitan erat dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik, serta pelayanan publik. Dalam perkembangannya, dinamika tuntutan masyarakat, kompleksitas lingkungan kebijakan, serta perubahan sosial, ekonomi, dan politik menuntut adanya kerangka analisis yang mampu menjelaskan keterkaitan antara berbagai aktor, proses pengambilan keputusan, serta dampak kebijakan secara sistematis. Oleh karena itu, kajian administrasi publik semakin membutuhkan pendekatan analitis yang mampu melihat hubungan antar komponen pemerintahan secara terpadu dan berkelanjutan.

Salah satu pendekatan yang relevan dalam memahami kompleksitas tersebut adalah pendekatan sistem. Dalam perspektif ilmu kebijakan publik, teori sistem yang dikembangkan oleh David Easton memandang kebijakan publik sebagai bagian dari sistem politik yang bekerja melalui mekanisme input–process–output–feedback, di mana tuntutan dan dukungan masyarakat menjadi input yang diproses melalui mekanisme politik dan administratif untuk menghasilkan kebijakan sebagai output, yang kemudian dievaluasi melalui mekanisme umpan balik (Easton D, 1965). Perspektif ini menegaskan bahwa kebijakan publik dan administrasi pemerintahan tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan sebagai bagian dari sistem terbuka yang terus berinteraksi dengan lingkungannya.

Pendekatan sistem dalam administrasi publik juga menekankan pentingnya memahami hubungan antara kebijakan, organisasi pemerintahan, serta lingkungan sosial yang lebih luas. Analisis kebijakan publik pada dasarnya merupakan

proses sistematis yang melibatkan identifikasi masalah, formulasi kebijakan, implementasi, serta evaluasi kebijakan dalam suatu siklus yang saling berkaitan (Dunn W N, 2018). Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, pendekatan sistem semakin relevan karena berbagai persoalan publik bersifat kompleks, lintas sektor, serta melibatkan berbagai aktor dan institusi. Oleh karena itu, pendekatan sistem sering digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami dinamika kebijakan dan pelayanan publik dalam konteks pemerintahan yang terus berubah (OECD, 2017).

Dalam literatur administrasi publik, pendekatan sistem telah lama digunakan untuk menganalisis organisasi publik sebagai suatu sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berinteraksi. (White MJ, 1980) menjelaskan bahwa organisasi publik dapat dipahami sebagai sistem yang mengintegrasikan berbagai fungsi administratif, proses pengambilan keputusan, serta interaksi dengan lingkungan eksternal. Perspektif ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan dan pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh bagaimana sistem administrasi mampu mengelola hubungan antara input, proses organisasi, dan hasil kebijakan.

Perkembangan kajian administrasi publik kontemporer juga menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap penggunaan pendekatan sistem dalam memahami tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. (Mansoor, Z., & Williams, 2024) (Mansoor, Z., & Williams, 2024) dan (Pressman, J. L., 1973) menegaskan bahwa pendekatan sistem memungkinkan peneliti dan praktisi kebijakan publik untuk memahami keterkaitan antara berbagai komponen kebijakan secara lebih komprehensif, terutama dalam konteks penyediaan layanan publik yang melibatkan berbagai aktor dan institusi. Selain itu, studi

tentang pemerintahan digital menunjukkan bahwa dinamika interaksi antara masyarakat, institusi pemerintahan, serta teknologi informasi juga dapat dianalisis melalui perspektif sistem yang menekankan hubungan antara tuntutan masyarakat, proses respons pemerintah, serta hasil kebijakan yang dihasilkan (Li, Z., Wu, W., 2023).

Meskipun pendekatan sistem telah lama diperkenalkan dalam kajian kebijakan publik dan administrasi publik, penggunaannya dalam penelitian sering kali masih bersifat parsial. Banyak penelitian lebih menekankan pada aspek tertentu, seperti input kebijakan atau output kebijakan, tanpa mengaitkannya secara sistematis dengan proses pengambilan keputusan, mekanisme umpan balik, serta pengaruh lingkungan yang lebih luas. Kondisi ini menyebabkan analisis kebijakan dan pelayanan publik cenderung bersifat fragmentatif dan kurang mampu menjelaskan dinamika tata kelola pemerintahan secara komprehensif.

Beberapa studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan sistem secara lebih integratif dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh terhadap proses kebijakan publik. Analisis berbasis sistem tidak hanya melihat hubungan sebab-akibat secara linear, tetapi juga mempertimbangkan interaksi dinamis antara berbagai komponen kebijakan dan lingkungan sosial-politik yang mempengaruhinya (PooserT, 2024). Dalam konteks proses pembuatan kebijakan, pendekatan input-output juga dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana tuntutan masyarakat diterjemahkan menjadi kebijakan publik melalui berbagai proses administratif dan politik (Pulami Magar R. B., 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan dan menganalisis kerangka pemikiran administrasi publik berbasis pendekatan sistem yang mencakup komponen input,

process, output, feedback, dan environment (IPOFE). Kerangka ini dikembangkan untuk menjelaskan keterkaitan antara tuntutan masyarakat, proses administrasi dan politik, hasil kebijakan, mekanisme umpan balik, serta pengaruh lingkungan dalam sistem administrasi publik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan studi administrasi publik, khususnya dalam memperkuat penggunaan pendekatan sistem sebagai kerangka analisis kebijakan publik dan pelayanan publik yang lebih komprehensif dan integratif.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian konseptual (*conceptual research*) yang berbasis kajian literatur. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk menguji hipotesis secara empiris, melainkan untuk merumuskan dan menganalisis kerangka pemikiran Administrasi Publik berbasis pendekatan sistem, khususnya model *Input-Process-Output-Feedback-Environment* (IPOFE) dalam kajian kebijakan publik dan pelayanan publik. Penelitian konseptual memungkinkan pengembangan argumentasi teoritis secara sistematis melalui sintesis berbagai perspektif dalam literatur Administrasi Publik.

Sumber data penelitian berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Literatur yang digunakan meliputi buku teks klasik dan kontemporer di bidang Administrasi Publik, artikel jurnal nasional terakreditasi, serta artikel jurnal internasional bereputasi yang membahas teori sistem, kebijakan publik, implementasi kebijakan, dan pelayanan publik. Literatur utama yang dianalisis mencakup karya-karya penting dalam teori sistem dan kebijakan publik, seperti pemikiran (Easton D, 1965), tentang sistem politik, teori birokrasi (Weber M,

1947), analisis implementasi kebijakan (Pressman, J. L., 1973), serta konsep *street-level bureaucracy* dari (Lipsky M., 1980). Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan literatur kontemporer mengenai tata kelola pemerintahan dan analisis kebijakan publik untuk memperkuat relevansi konseptual penelitian.

Proses pengumpulan literatur dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, penentuan fokus kajian yang menitikberatkan pada pendekatan sistem sebagai kerangka pemikiran dalam Administrasi Publik. Kedua, penelusuran literatur melalui basis data akademik seperti jurnal ilmiah, buku referensi, dan publikasi kebijakan yang relevan dengan topik penelitian. Ketiga, seleksi literatur dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu relevansi dengan tema penelitian, otoritas akademik penulis, serta keterbaruan publikasi. Melalui proses seleksi tersebut, literatur yang digunakan dalam penelitian ini terutama berasal dari publikasi ilmiah yang memiliki kontribusi penting dalam pengembangan teori sistem dan analisis kebijakan publik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu pengumpulan dan penelaahan dokumen ilmiah berupa buku, artikel jurnal, serta publikasi akademik lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengembangan konsep dan kerangka pemikiran, sehingga sumber utama analisis berasal dari literatur ilmiah yang telah dipublikasikan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan mengidentifikasi dan memilih konsep serta teori yang paling relevan dengan pendekatan sistem dalam Administrasi Publik. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian analitis dan tabel konseptual yang menggambarkan hubungan antara

komponen input, process, output, feedback, dan environment dalam sistem administrasi publik. Tahap akhir analisis dilakukan melalui sintesis konseptual untuk merumuskan model kerangka pemikiran berbasis pendekatan sistem yang dapat digunakan dalam kajian kebijakan publik dan pelayanan publik.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai perspektif teori dan temuan penelitian dari literatur yang berbeda. Selain itu, ketekunan dalam penelaahan literatur dilakukan untuk memastikan konsistensi dan koherensi argumentasi teoritis yang dibangun dalam penelitian ini. Dengan demikian, kerangka pemikiran yang dihasilkan memiliki dasar konseptual yang kuat serta relevan bagi pengembangan kajian Administrasi Publik.

ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian konseptual (*conceptual research*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk menguji hipotesis secara empiris, melainkan untuk merumuskan dan menganalisis kerangka pemikiran Administrasi Publik berbasis pendekatan sistem, khususnya model *input-process-output-feedback-environment* dalam kajian kebijakan publik dan pelayanan publik. Penelitian konseptual memungkinkan peneliti melakukan pengembangan argumentasi teoritis secara reflektif dan sistematis berdasarkan literatur ilmiah yang relevan.

Bahan penelitian bersumber dari data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Sumber data meliputi buku teks klasik dan kontemporer di bidang Administrasi Publik dan kebijakan publik, artikel jurnal nasional terakreditasi, serta artikel jurnal internasional bereputasi yang membahas teori sistem, kebijakan publik, implementasi kebijakan, dan pelayanan publik. Literatur utama yang dirujuk antara lain karya (Easton D, 1965) tentang teori sistem

politik, serta literatur pendukung dari (Weber M, 1947), (Foucault M, 1977), (Pressman, J. L., 1973), (Pressman, J. L., 1973), serta (Lipsky M., 1980).

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan.

Pertama, penentuan fokus kajian, yaitu pendekatan sistem sebagai kerangka pemikiran dalam Administrasi Publik. *Kedua*, penelusuran dan seleksi literatur, dengan kriteria relevansi tema, otoritas penulis, dan keterbaruan publikasi. *Ketiga*, pengelompokan konsep dan teori, terutama yang berkaitan dengan unsur *input, process, output, feedback*, dan *environment* dalam kebijakan publik dan pelayanan publik.

Keempat, sintesis dan perumusan kerangka pemikiran, dengan mengaitkan konsep-konsep tersebut ke dalam satu alur analisis sistemik Administrasi Publik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu pengumpulan dan penelaahan dokumen ilmiah berupa buku, artikel jurnal, dan publikasi akademik lainnya. Teknik ini dipandang relevan karena penelitian berfokus pada pengembangan konsep dan kerangka pemikiran, bukan pada pengumpulan data lapangan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring konsep dan teori yang paling relevan dengan pendekatan sistem. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif dan skema kerangka pemikiran. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mensintesis temuan konseptual untuk merumuskan kontribusi teoritis pendekatan sistem dalam Administrasi Publik.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan pandangan dari berbagai literatur dan perspektif teori, serta ketekunan penelaahan literatur untuk

memastikan konsistensi dan koherensi argumentasi. Dengan demikian, kerangka pemikiran yang dihasilkan memiliki landasan teoritis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Posisi Kerangka dalam Kajian Administrasi Publik

Hasil kajian literatur terhadap berbagai publikasi Administrasi Publik menunjukkan bahwa penggunaan istilah kerangka berpikir, kerangka pemikiran, dan kerangka konseptual masih sering mengalami kerancuan dalam praktik penelitian. Analisis terhadap artikel jurnal Administrasi Publik dan kebijakan publik menunjukkan bahwa sebagian peneliti menggunakan ketiga istilah tersebut secara bergantian tanpa membedakan fungsi metodologisnya. Kondisi ini menyebabkan struktur argumentasi penelitian menjadi kurang sistematis dan berpotensi melemahkan keterkaitan antara teori, konsep, serta analisis empiris.

Studi sistematis terhadap literatur kebijakan publik menunjukkan bahwa kerangka analitis yang jelas merupakan elemen penting dalam penelitian kebijakan dan administrasi publik. William N. Dunn menegaskan bahwa analisis kebijakan publik membutuhkan struktur analitis yang mampu menjelaskan hubungan antara masalah publik, proses pengambilan keputusan, serta hasil kebijakan secara sistematis (Dunn W N, 2018). Tanpa kerangka analitis yang jelas, penelitian kebijakan publik cenderung bersifat deskriptif dan kurang mampu menjelaskan hubungan sebab akibat dalam proses kebijakan.

Dalam kajian kebijakan publik modern, proses kebijakan juga dipahami sebagai rangkaian tahapan yang saling berkaitan mulai dari perumusan masalah, formulasi kebijakan, implementasi, hingga

evaluasi kebijakan. Pendekatan ini dikenal sebagai *policy cycle* yang menjelaskan dinamika proses kebijakan dalam sistem pemerintahan (Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, 2015).

Dalam perspektif pendekatan sistem, hubungan antara tuntutan masyarakat, proses administrasi, dan hasil kebijakan dapat dipahami melalui mekanisme sistem terbuka yang saling berinteraksi. Teori sistem politik menjelaskan bahwa sistem kebijakan bekerja melalui mekanisme input–process–output–feedback yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (Easton D, 1965), 1965). Pendekatan ini kemudian berkembang dalam kajian administrasi publik modern yang melihat organisasi publik sebagai sistem kompleks yang melibatkan interaksi antar aktor, institusi, serta lingkungan kebijakan (White MJ, 1980), (Pulami Magar R. B., 2025).

Dalam konteks implementasi kebijakan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusan kebijakan, tetapi juga oleh proses implementasinya. Studi klasik mengenai implementasi kebijakan mengemukakan adanya dua pendekatan utama, yaitu pendekatan top-down yang menekankan peran pemerintah pusat dan desain kebijakan, serta pendekatan bottom-up yang menekankan peran aktor pelaksana di tingkat lapangan (Sabatier P. A, 1986). Perkembangan kajian implementasi kebijakan selanjutnya menunjukkan bahwa implementasi tidak hanya dipengaruhi oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh kapasitas organisasi, perilaku birokrasi pelaksana, serta interaksi antara aktor kebijakan dalam konteks kelembagaan tertentu (Winter, 2012).

Kajian implementasi selanjutnya menekankan bahwa pelaksanaan kebijakan melibatkan interaksi antara berbagai aktor, organisasi, serta konteks kelembagaan dalam sistem tata kelola pemerintahan (Hill, M., 2014).

Kajian kontemporer juga menunjukkan meningkatnya penggunaan pendekatan sistem dalam analisis tata kelola pemerintahan. Studi *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD, 2017) menunjukkan bahwa berbagai persoalan sektor publik seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebijakan sosial semakin membutuhkan pendekatan sistem karena karakter masalah publik bersifat kompleks, lintas sektor, dan melibatkan berbagai aktor kebijakan. Penelitian (Mansoor, Z., & Williams, 2024) juga menunjukkan bahwa pendekatan sistem mampu meningkatkan efektivitas analisis pelayanan publik dengan menghubungkan berbagai komponen kebijakan secara lebih komprehensif.

Berdasarkan hasil analisis literatur tersebut, penelitian ini merumuskan pendekatan sistem berbasis Input–Process–Output–Feedback–Environment (IPOFE) sebagai kerangka pemikiran integratif dalam kajian administrasi publik. Kerangka ini dikembangkan untuk menjelaskan keterkaitan antara tuntutan masyarakat sebagai input, proses administratif dan politik dalam sistem birokrasi, hasil kebijakan sebagai output, mekanisme evaluasi melalui feedback, serta pengaruh lingkungan eksternal terhadap sistem administrasi publik.

Pendekatan IPOFE memungkinkan peneliti untuk memahami proses kebijakan secara lebih komprehensif dibandingkan pendekatan linear. Hal ini sejalan dengan penelitian (Pulami Magar R. B., 2025) yang menunjukkan bahwa analisis kebijakan berbasis sistem input–output mampu menjelaskan dinamika kebijakan secara lebih sistematis karena mempertimbangkan hubungan antara berbagai komponen kebijakan dan lingkungan sosial politik yang mempengaruhinya.

2. Pendekatan Sistem IPOFE dalam Administrasi Publik

Pendekatan sistem dalam Administrasi Publik memandang proses kebijakan sebagai suatu sistem terbuka

yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi. Dalam perspektif ini, kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai produk keputusan pemerintah, tetapi sebagai hasil interaksi antara tuntutan masyarakat, proses administrasi, serta dinamika lingkungan kebijakan.

Dalam konteks *governance* modern, lingkungan kebijakan mencakup berbagai aktor dan institusi yang saling berinteraksi dalam sistem tata kelola publik (Bevir M, 2013).

Dalam teori sistem politik, (Easton D, 1965) menjelaskan bahwa sistem kebijakan bekerja melalui mekanisme *input*, *process*, *output*, dan *feedback* yang berlangsung secara dinamis dalam suatu lingkungan sosial dan politik. Konsep ini kemudian berkembang dalam kajian administrasi publik modern yang menekankan pentingnya memahami hubungan antara organisasi publik, masyarakat, serta lingkungan kebijakan yang lebih luas (PooserT, 2024).

Pendekatan sistem juga digunakan dalam berbagai studi kontemporer mengenai pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Penelitian (Li, Z., Wu, W., 2023), menunjukkan bahwa dalam konteks pemerintahan digital, respons pemerintah terhadap tuntutan masyarakat sangat dipengaruhi oleh interaksi antara tekanan publik, kapasitas organisasi, serta sistem administrasi yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa sistem administrasi publik tidak bersifat statis, melainkan adaptif terhadap perubahan lingkungan kebijakan.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan sistem dikembangkan melalui model IPOFE (*Input-Process-Output-Feedback-Environment*) yang menjelaskan hubungan sistematis antara berbagai komponen administrasi publik. Model ini memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan linear karena mempertimbangkan mekanisme umpan balik serta pengaruh lingkungan eksternal terhadap sistem kebijakan.

Tabel 1
Model Sistem IPOFE dalam
Administrasi Publik

Komponen Sistem	Dimensi Analisis	Contoh dalam Administrasi Publik
Input	Tuntutan masyarakat, sumber daya, dukungan politik	Aspirasi publik, data kebutuhan layanan, tekanan kelompok kepentingan
Process	Mekanisme administrasi dan politik dalam pembuatan dan implementasi kebijakan	Perumusan kebijakan, koordinasi birokrasi, implementasi program
Output	Hasil kebijakan dan pelayanan publik	Program pemerintah, regulasi publik, pelayanan administrasi
Feedback	Evaluasi kebijakan dan respons masyarakat	Survei kepuasan publik, evaluasi kebijakan, kritik masyarakat
Environment	Kondisi sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang mempengaruhi sistem	Perubahan ekonomi, dinamika politik, perkembangan teknologi

Sumber: diolah peneliti berdasarkan (Easton D, 1965), (White MJ, 1980), (Dunn W N, 2018), dan (OECD, 2017).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa sistem administrasi publik bekerja melalui interaksi dinamis antara berbagai komponen yang saling mempengaruhi. *Input* dalam sistem administrasi publik berasal dari tuntutan masyarakat, sumber daya pemerintah, serta dukungan politik yang mempengaruhi proses kebijakan. *Input* ini kemudian diproses melalui mekanisme administratif dan politik dalam sistem birokrasi untuk menghasilkan *output* berupa kebijakan publik dan pelayanan masyarakat.

Hasil kebijakan tersebut kemudian menghasilkan *feedback* yang berasal dari masyarakat maupun institusi pengawasan. Mekanisme umpan balik ini berperan penting dalam memperbaiki kualitas kebijakan serta meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Selain itu, seluruh proses tersebut berlangsung dalam suatu environment yang meliputi kondisi sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang memengaruhi dinamika kebijakan publik.

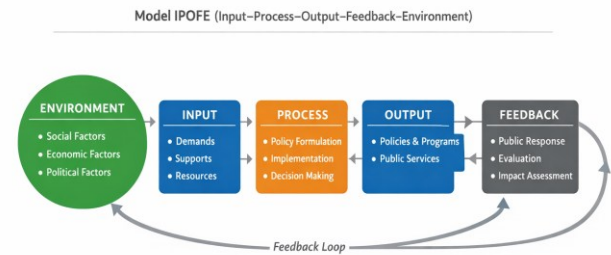
Pendekatan sistem IPOFE ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga oleh bagaimana sistem administrasi publik mampu mengelola hubungan antara input masyarakat, proses administrasi, serta mekanisme evaluasi kebijakan secara berkelanjutan. Dalam konteks governance modern, pendekatan sistem juga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap keterlibatan aktor non-pemerintah dalam proses kebijakan, seperti sektor swasta dan masyarakat sipil (Rhodes R A W, 1996).

3. Model Sistem Administrasi Publik Berbasis IPOFE

Pendekatan sistem dalam Administrasi Publik dapat dijelaskan melalui integrasi lima komponen utama, yaitu *input*, *process*, *output*, *feedback*, dan *environment*. Kelima komponen tersebut membentuk suatu sistem terbuka yang menunjukkan bagaimana tuntutan masyarakat diproses dalam mekanisme kebijakan dan administrasi, menghasilkan kebijakan publik, serta menerima umpan balik dari masyarakat dan lingkungan kebijakan.

Gambar berikut menunjukkan kerangka model sistem Administrasi Publik berbasis IPOFE yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Gambar 1. Model Sistem Administrasi Publik Berbasis IPOFE (*Input-Process-Output-Feedback-Environment*)



Sumber: Hasil Penelitian (diolah Peneliti, 2026)

Model Sistem Administrasi Publik berbasis *Input-Process-Output-Feedback-Environment* (IPOFE) menggambarkan administrasi publik sebagai suatu sistem terbuka yang dinamis dan saling berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam model ini, proses kebijakan dan pelayanan publik tidak dipahami sebagai proses linear, melainkan sebagai siklus sistemik yang melibatkan hubungan timbal balik antara tuntutan masyarakat, mekanisme administrasi, hasil kebijakan, serta respons lingkungan sosial dan politik. Pendekatan sistem ini berakar pada teori sistem politik yang dikembangkan oleh (Easton D, 1965), yang memandang kebijakan publik sebagai hasil interaksi antara berbagai elemen dalam suatu sistem politik dan administratif.

Komponen pertama dalam model ini adalah input, yang merepresentasikan berbagai tuntutan, kebutuhan, aspirasi, serta dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Input juga dapat berupa sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, seperti kapasitas kelembagaan, regulasi, anggaran, serta informasi kebijakan. Dalam konteks administrasi publik, input menjadi titik awal yang mendorong munculnya agenda kebijakan dan kebutuhan akan intervensi pemerintah. Berbagai studi kebijakan publik menunjukkan bahwa kualitas input sangat mempengaruhi efektivitas proses kebijakan, karena tuntutan masyarakat dan kapasitas institusi akan menentukan arah

dan prioritas kebijakan publik (Dunn W N, 2018).

Komponen kedua adalah *process*, yaitu mekanisme pengolahan input dalam sistem administrasi publik melalui proses perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, serta implementasi program dan pelayanan publik. Proses ini melibatkan berbagai aktor, mulai dari lembaga pemerintah, birokrasi pelaksana, hingga jaringan aktor non-negara dalam sistem tata kelola modern. Dalam perspektif administrasi publik kontemporer, proses kebijakan tidak hanya berlangsung secara hirarkis dalam birokrasi, tetapi juga melalui mekanisme kolaboratif dan jejaring *governance* yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (OECD, 2017). Oleh karena itu, efektivitas proses administrasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, koordinasi antar lembaga, serta kualitas implementasi kebijakan.

Selanjutnya, *output* merupakan hasil dari proses administrasi dan kebijakan yang diwujudkan dalam bentuk regulasi, program pemerintah, maupun pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. *Output* kebijakan mencerminkan sejauh mana sistem administrasi mampu merespons tuntutan publik secara efektif dan efisien. Dalam kerangka sistem administrasi publik, *output* tidak hanya dilihat sebagai produk kebijakan semata, tetapi juga sebagai indikator kinerja pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan.

Komponen berikutnya adalah *feedback*, yaitu respons masyarakat, evaluasi kebijakan, serta berbagai bentuk penilaian publik terhadap *output* kebijakan yang dihasilkan pemerintah. Umpan balik ini sangat penting karena menjadi mekanisme koreksi bagi sistem administrasi publik untuk memperbaiki kebijakan dan proses administrasi pada siklus berikutnya. Dalam kerangka sistem, *feedback* memungkinkan terjadinya proses pembelajaran kebijakan (*policy learning*)

yang mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.

Dalam implementasi kebijakan publik, hasil kebijakan tidak selalu menghasilkan dampak yang sepenuhnya sesuai dengan tujuan awal kebijakan. Kebijakan publik sering kali menimbulkan konsekuensi yang tidak direncanakan sebagai bagian dari dinamika sistem sosial yang kompleks (Merton R K, 1968). Oleh karena itu, mekanisme *feedback* dalam sistem administrasi publik menjadi penting untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan yang telah diimplementasikan.

Seluruh komponen tersebut berlangsung dalam suatu *environment* atau lingkungan kebijakan yang mencakup kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang mempengaruhi jalannya sistem administrasi publik. Lingkungan ini dapat memperkuat maupun membatasi kapasitas sistem administrasi dalam merespons tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan sistem menekankan pentingnya memahami konteks lingkungan secara komprehensif agar kebijakan publik dapat dirumuskan dan diimplementasikan secara adaptif terhadap perubahan situasi yang terjadi (MansoorZ & Williams MJ, 2024).

Dengan demikian, model IPOFE menunjukkan bahwa administrasi publik bekerja sebagai suatu sistem yang saling terhubung dan berkesinambungan. Input masyarakat diproses melalui mekanisme administratif, menghasilkan *output* kebijakan, kemudian memperoleh umpan balik dari masyarakat yang selanjutnya mempengaruhi input pada siklus berikutnya. Seluruh proses tersebut berlangsung dalam lingkungan yang dinamis dan kompleks. Model ini memberikan kerangka analisis yang komprehensif bagi kajian administrasi publik dalam memahami hubungan antara kebijakan, proses administrasi, dan konteks tata kelola pemerintahan secara sistemik.

Pendekatan sistem dalam kajian administrasi publik sebenarnya telah lama menjadi landasan analisis kebijakan publik. Model sistem politik yang dikembangkan

oleh Easton menempatkan kebijakan publik sebagai hasil interaksi antara input berupa tuntutan dan dukungan masyarakat, process dalam sistem politik dan administratif, serta output berupa keputusan dan kebijakan publik (Easton D, 1965). Model ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana sistem pemerintahan merespons berbagai tuntutan publik secara sistemik.

Perkembangan studi kebijakan publik selanjutnya memperkaya pendekatan sistem dengan menyoroti kompleksitas proses implementasi kebijakan. Studi klasik tentang implementasi kebijakan menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika organisasi birokrasi serta interaksi antara aktor kebijakan di lapangan (Pressman, J. L., 1973); (Lipsky M., 1980). Dalam perspektif yang lebih kontemporer, penelitian mengenai governance juga menegaskan bahwa proses kebijakan publik semakin dipengaruhi oleh jaringan aktor, institusi, serta faktor lingkungan yang melampaui batas organisasi pemerintah formal (Rhodes R A W, 1996); (OECD, 2017).

Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih menempatkan pendekatan sistem secara parsial dalam analisis kebijakan publik. Banyak studi yang hanya menyoroti hubungan antara *input-process-output*, sementara dimensi *feedback* dan *environment* belum sepenuhnya diintegrasikan sebagai bagian analisis yang sistematis dalam kerangka penelitian administrasi publik. Kondisi ini menyebabkan analisis kebijakan seringkali kurang mampu menangkap dinamika siklus kebijakan secara utuh, terutama dalam menjelaskan bagaimana respons masyarakat dan perubahan lingkungan mempengaruhi proses kebijakan berikutnya.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, artikel ini mengembangkan model *Input-Process-Output-Feedback-Environment* (IPOFE) sebagai kerangka sistem administrasi publik yang lebih

komprehensif. Model ini tidak hanya mengadopsi prinsip dasar pendekatan sistem klasik, tetapi juga menambahkan dimensi *feedback* dan *environment* sebagai elemen penting yang menjelaskan dinamika hubungan antara kebijakan publik, masyarakat, dan konteks tata kelola pemerintahan yang terus berkembang.

Dibandingkan dengan model sistem klasik yang umumnya berfokus pada hubungan linear antara *input*, *process*, dan *output*, model IPOFE menawarkan kerangka analitis yang lebih komprehensif dan adaptif dalam memahami dinamika administrasi publik. Keunggulan utama model ini terletak pada integrasi dua dimensi penting, yaitu *feedback* dan *environment*, yang memungkinkan analisis kebijakan publik dilakukan secara lebih sistemik dan kontekstual.

Dimensi *feedback* dalam model IPOFE berfungsi sebagai mekanisme evaluasi dan pembelajaran kebijakan yang menghubungkan kembali hasil kebijakan dengan tuntutan masyarakat. Melalui mekanisme ini, sistem administrasi publik tidak hanya menghasilkan kebijakan, tetapi juga mampu menyesuaikan diri berdasarkan respons masyarakat, evaluasi kinerja, serta dinamika implementasi kebijakan. Dengan demikian, proses kebijakan tidak bersifat statis atau linear, melainkan berkembang secara siklik dan adaptif.

Sementara itu, dimensi *environment* menegaskan bahwa sistem administrasi publik tidak beroperasi dalam ruang yang tertutup, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti kondisi sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Perubahan lingkungan tersebut dapat mempengaruhi munculnya tuntutan publik, proses pengambilan keputusan, maupun efektivitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, dengan memasukkan dimensi lingkungan secara eksplisit, model IPOFE memungkinkan analisis kebijakan publik dilakukan secara lebih kontekstual dan relevan dengan dinamika tata kelola pemerintahan modern.

4. Research Gap dalam Kajian Sistem Administrasi Publik

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menggunakan pendekatan sistem untuk menjelaskan dinamika kebijakan publik dan administrasi pemerintahan. Teori sistem yang dikembangkan oleh (Easton D, 1965) misalnya, menjelaskan bagaimana tuntutan masyarakat (*input*) diproses oleh sistem politik untuk menghasilkan keputusan publik (*output*). Pendekatan ini menjadi pondasi penting dalam studi kebijakan publik dan administrasi pemerintahan modern.

Namun demikian, dalam perkembangan kajian Administrasi Publik kontemporer, model sistem klasik tersebut masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, sebagian penelitian lebih menekankan hubungan antara input dan output kebijakan, sementara dimensi feedback sering kali tidak dianalisis secara eksplisit sebagai bagian dari mekanisme evaluasi kebijakan. Kedua, faktor lingkungan eksternal seperti dinamika sosial, ekonomi, dan politik sering diposisikan hanya sebagai konteks umum, bukan sebagai variabel analisis yang secara langsung mempengaruhi proses kebijakan.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan analitis dalam penelitian Administrasi Publik yang menggunakan pendekatan sistem. Banyak studi kebijakan publik masih menggunakan model sistem secara sederhana dan belum mengintegrasikan secara utuh hubungan antara input, proses kebijakan, hasil kebijakan, umpan balik masyarakat, serta pengaruh lingkungan eksternal. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan kerangka analitis yang mampu menjelaskan interaksi sistem administrasi publik secara lebih komprehensif dan dinamis.

Untuk memperjelas posisi konseptual model IPOFE dalam kajian Administrasi Publik, perlu dilakukan perbandingan antara model sistem klasik yang banyak digunakan dalam studi kebijakan publik dengan model sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini.

Perbandingan tersebut bertujuan untuk menunjukkan bagaimana model IPOFE memperluas kerangka analisis sistem dengan memasukkan dimensi umpan balik dan lingkungan sebagai komponen penting dalam dinamika administrasi publik.

Tabel 2. Perbandingan Model Sistem Klasik dan Model IPOFE dalam Analisis Administrasi Publik

Aspek Analisis	Model Sistem Klasik (Easton, 1965)	Model IPOFE dalam Penelitian Ini
Komponen utama sistem	<i>Input – Process – Output</i>	<i>Input – Process – Output – Feedback – Environment</i>
Fokus analisis	Proses konversi tuntutan masyarakat menjadi keputusan politik	Dinamika sistem administrasi publik secara komprehensif
Peran umpan balik	Tidak dijelaskan secara eksplisit	<i>Feedback</i> menjadi mekanisme evaluasi kebijakan
Peran lingkungan	Dipahami sebagai konteks umum	<i>Environment</i> menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi seluruh sistem
Sifat hubungan sistem	Cenderung linear	Bersifat siklik dan adaptif
Relevansi dalam governance modern	Dasar teori sistem politik	Kerangka analisis administrasi publik yang lebih kontekstual

Sumber: Adaptasi dari Easton (1965) dan hasil sintesis penelitian (2026).

Berdasarkan perbandingan tersebut, model IPOFE menunjukkan kontribusi penting dalam pengembangan kajian Administrasi Publik berbasis pendekatan sistem. Model ini tidak hanya mempertahankan struktur dasar analisis sistem yang telah dikembangkan dalam teori klasik, tetapi juga memperluasnya dengan memasukkan dimensi umpan balik dan lingkungan secara eksplisit dalam kerangka analisis kebijakan publik.

Keunggulan utama model IPOFE terletak pada kemampuannya menjelaskan siklus kebijakan publik secara lebih dinamis, di mana hasil kebijakan tidak dipahami sebagai titik akhir proses kebijakan, melainkan sebagai bagian dari mekanisme pembelajaran sistem melalui umpan balik masyarakat. Selain itu, dengan memasukkan faktor lingkungan sebagai elemen analitis yang penting, model ini memungkinkan analisis administrasi publik dilakukan secara lebih kontekstual sesuai dengan kompleksitas tata kelola pemerintahan modern.

Dengan demikian, model IPOFE dapat diposisikan sebagai pengembangan konseptual dari model sistem klasik, yang memberikan kerangka analitis lebih komprehensif untuk memahami dinamika kebijakan publik dan pelayanan publik dalam konteks *governance* kontemporer.

Secara keseluruhan, model IPOFE memberikan kontribusi konseptual dalam memperluas pendekatan sistem dalam Administrasi Publik dengan menghadirkan kerangka analitis yang lebih integratif. Model ini tidak hanya memperjelas hubungan antara berbagai elemen dalam sistem kebijakan publik, tetapi juga membantu peneliti dan praktisi administrasi publik memahami bagaimana kebijakan, masyarakat, dan lingkungan saling berinteraksi dalam membentuk dinamika tata kelola pemerintahan yang responsif dan adaptif

5. Implikasi Teoritis Model IPOFE dalam Administrasi Publik

Pengembangan Model Sistem Administrasi Publik Berbasis IPOFE (*Input-*

Process-Output-Feedback-Environment) memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya pendekatan sistem dalam studi Administrasi Publik. Pendekatan sistem telah lama digunakan untuk memahami dinamika kebijakan publik dan organisasi pemerintahan, terutama melalui model sistem politik yang dikemukakan oleh David Easton. Dalam model tersebut, kebijakan dipahami sebagai hasil dari interaksi antara tuntutan masyarakat (*input*) dengan proses pengambilan keputusan dalam sistem politik yang menghasilkan output kebijakan (Easton D, 1965).

Namun demikian, perkembangan kompleksitas tata kelola pemerintahan modern menuntut pendekatan analisis yang lebih komprehensif. Sistem administrasi publik saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh proses internal organisasi, tetapi juga oleh dinamika lingkungan eksternal seperti perubahan sosial, perkembangan teknologi, tuntutan transparansi, serta tekanan global terhadap praktik pemerintahan yang akuntabel dan responsif. Oleh karena itu, integrasi unsur *environment* dan *feedback* secara eksplisit dalam model IPOFE memberikan dimensi analitis yang lebih luas dibandingkan model sistem klasik.

Model IPOFE juga memperkuat perspektif bahwa kebijakan publik dan pelayanan publik merupakan proses yang bersifat dinamis, adaptif, dan berkelanjutan. Keberadaan komponen *feedback* memungkinkan sistem administrasi publik melakukan pembelajaran institusional (*institutional learning*), yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk mengevaluasi kinerja kebijakan dan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan. Hal ini sejalan dengan perkembangan paradigma administrasi publik modern yang menekankan pentingnya evaluasi kebijakan dan mekanisme pembelajaran organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, unsur *environment* dalam model IPOFE menegaskan bahwa sistem administrasi publik tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, politik, ekonomi, dan

budaya yang melingkupinya. Lingkungan eksternal tersebut berperan sebagai faktor yang mempengaruhi arah kebijakan, prioritas program pemerintah, serta pola interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, model IPOFE membantu menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas proses administratif, tetapi juga oleh kemampuan sistem administrasi publik dalam merespons perubahan lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa model IPOFE menawarkan kerangka analisis yang lebih integratif dalam memahami dinamika administrasi publik. Model ini tidak hanya menempatkan kebijakan sebagai produk dari proses administratif, tetapi juga sebagai bagian dari suatu sistem yang terus berinteraksi dengan lingkungan serta menerima umpan balik dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, model IPOFE berpotensi menjadi kerangka konseptual yang relevan untuk menganalisis kebijakan publik dan pelayanan publik dalam konteks pemerintahan kontemporer (Bank World, 2017).

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan sistem berbasis *Input-Process-Output-Feedback-Environment* (IPOFE) memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam memahami dinamika administrasi publik sebagai suatu sistem terbuka. Melalui kajian konseptual terhadap literatur administrasi publik dan kebijakan publik, penelitian ini menemukan bahwa integrasi lima komponen sistem tersebut mampu menjelaskan keterkaitan antara tuntutan masyarakat, proses pengambilan keputusan administratif dan politik, hasil kebijakan, mekanisme umpan balik, serta pengaruh lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Kerangka IPOFE memperkuat pemahaman bahwa administrasi publik tidak dapat dianalisis secara parsial, tetapi

harus dilihat sebagai proses sistemik yang bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Dengan demikian, pendekatan sistem dapat digunakan sebagai kerangka pemikiran yang integratif dalam penelitian maupun praktik administrasi publik, khususnya dalam analisis kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Secara akademik, artikel ini memberikan kontribusi konseptual dalam memperjelas hubungan antara kerangka berpikir, kerangka pemikiran, dan kerangka konseptual dalam studi administrasi publik melalui perspektif sistem. Ke depan, penelitian lanjutan disarankan untuk menguji kerangka IPOFE secara empiris pada berbagai sektor kebijakan publik guna memperkuat validitas dan relevansi model ini dalam praktik tata kelola pemerintahan.

Kebaruan artikel ini terletak pada pengembangan kerangka pemikiran Administrasi Publik berbasis pendekatan sistem melalui model *Input-Process-Output-Feedback-Environment* (IPOFE) yang mengintegrasikan berbagai konsep dalam kajian kebijakan publik dan pelayanan publik ke dalam satu kerangka analitis yang utuh. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung membahas komponen sistem secara terpisah, artikel ini menempatkan IPOFE sebagai model konseptual yang menjelaskan hubungan dinamis antara tuntutan masyarakat, proses administrasi dan politik, hasil kebijakan, mekanisme umpan balik, serta pengaruh lingkungan eksternal.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada penguatan perspektif sistem dalam studi Administrasi Publik serta menawarkan kerangka konseptual yang dapat digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank World. (2017). *World development report 2017: Governance and the law*.
- Bevir M. (2013). *Governance: A very short introduction*. Oxford University Press.
- Dunn W N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach (6th ed.)*. Routledge.
- Easton D. (1965). *A systems analysis of political life*. John Wiley & Sons, Inc.
- Foucault M. (1977). *Discipline and punish: The birth of the prison*. Pantheon Books.
- Hill, M., & H. P. (2014). *Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2015). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems (3rd ed.)*. Oxford University Press.
- Li, Z., Wu, W., & M. Q. (2023). The adjustment of pressure perception in e-government response: A perspective of political system theory. *Systems. A Perspective of Political System Theory. Systems, 11(3)*, 158.
- Lipsky M. (1980). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. Russell Sage Foundation.
- Mansoor, Z., & Williams, M. J. (2024). Systems approaches to public service delivery: Methods and frameworks. *Journal of Public Policy. Journal of Public Policy, 44(2)*.
- MansoorZ & Williams MJ. (2024). Systems approaches to public service delivery: Methods and frameworks. *Journal of Public Policy, 44(2)*, 258–283.
- Merton R K. (1968). *Social theory and social structure*. The Free Press.
- OECD. (2017). *Systems approaches to public sector challenges: Working with change*.
- PooserT. (2024). *A systems approach to public administration and social equity: Culture and learning*. Emerald Publishing.
- Pressman, J. L., & W. A. (1973). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland*. University of California Press.
- Pulami Magar R. B. (2025). Input-output analysis in the policy-making process: An analysis of systems theory. *Chaturbhujeshwar Academic Journal, 3(1)*, 39–49.
- Rhodes R A W. (1996). The new governance: Governing without government. *Political Studies, 44(4)*, 652–667.
- Sabatier P. A. (1986). Top-down and bottom-up approaches to implementation research: A critical analysis and suggested synthesis. *Journal of Public Policy, 6(1)*, 21–48.
- Weber M. (1947). *The theory of social and economic organization*. Oxford University Press.
- White MJ. (1980). *Managing public systems: Analytic techniques for public administration*. Duxbury Press.
- Winter, S. C. (2012). *Implementation*. In B. G. Peters & J. Pierre (Eds.), *The Sage handbook of public administration (pp. 255–273)*. SAGE Publications.